



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

Tahun Sidang	: 2020-2021
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke	: 12
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: Menteri Sosial RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Keuangan RI, Menteri Dalam Negeri RI, , Menteri Kesehatan RI, MenPAN dan RB RI, dan DPD RI
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Senin, 7 September 2020.
Waktu	: Pukul 14.00 WIB.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270.
Acara	: <ol style="list-style-type: none">1. Pengantar Pimpinan2. Penjelasan Pengusul3. Pandangan Pemerintah atas RUU tentang Penanggulangan Bencana.4. Pandangan dan Pendapat DPD RI atas RUU tentang Penanggulangan Bencana.5. Pembentukan Panja.6. Pengesahan Mekanisme Rapat Penutup
Ketua Rapat	: H.YANDRI SUSANTO, SPt.
Sekretaris Rapat	: Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.
Hadir	: <ol style="list-style-type: none">1. 48 dari 52 Anggota Komisi VIII DPR RI.2. 4 Orang Anggota Komisi VIII DPR RI Izin.3. Menteri Sosial RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Keuangan RI, Perwakilan Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Kesehatan RI,Perwakilan MenPAN dan RB RI, dan Ketua Komite II DPD RI

I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 14.32 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, H.Yandri Susanto, S.Pt dengan didampingi Wakil Ketua H.M.R. Ihsan Yunus, ME.Con.,Std, Wakil Ketua DR. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si Wakil Ketua Laksdya TNI (PURN) Moekhlas Sidik, MPA. dan Wakil Ketua H. Marwan Dasopang, M.Si, sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial RI, Kesehatan RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Keuangan RI, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI, dan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah RI dengan agenda "Penjelasan Komisi VIII DPR RI atas RUU tentang Penanggulangan Bencana dan Pandangan Presiden/Pemerintah dan DPD RI atas RUU tentang Penanggulangan Bencana" dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI menyepakati pembahasan DIM RUU tentang Penanggulangan Bencana, selanjutnya pembahasan ini akan dilakukan pada Masa Persidangan 2020-2021. Selanjutnya Komisi VIII DPR RI dan Pemerintah menyepakati Jumlah DIM Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana terdiri dari 591 DIM, yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. DIM yang berstatus TETAP berjumlah 370 DIM langsung disetujui Raker.
 - b. DIM yang berstatus PERUBAHAN SUBTANSI berjumlah 19 DIM, PENAMBAHAN SUBSTANSI BARU berjumlah 27 DIM dan yang DIHAPUS berjumlah 70 DIM. Selanjutnya pembahasannya diserahkan ke Panitia Kerja (PANJA).
 - c. DIM yang berstatus PERUBAHAN REDAKSIONAL 104 DIM pembahasannya diserahkan ke Tim Perumus (TIMUS).

Komisi VIII DPR RI dan Pemerintah menyepakati pembentukan Panja Pemerintah dan DPR RI.

III. P E N U T U P

Rapat ditutup pukul 15.20 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
KETUA,**



H.YANDRI SUSANTO, SPt.